

KONTROVERSI TENTANG SAYYID UTSMAN BIN YAHYA (1822-1914) SEBAGAI PENASEHAT SNOUCK HURGRONJE

Dr. Muhammad Noupal, M.Ag *

ABSTRACT

The position of Sayyid Utsman in Islamic history of Nusantara is so controversial. In one case, he is an ulama and mufti, but in the other side, he was a Snouck Hurgronje's friend and government advisor of Netherland East Indies.

The controversy of Sayyid Utsman as an advisor of the government can be understood from three sides; 1) social and political background of Arabian community is so various that time, compelled the government to point Sayyid Uthman as an advisor, especially to give more information and opinions about Arabian community; 2) considering about information from Sayyid Utsman is so helpful to the Snouck's research, therefore Snouck proposed the government to point him as an advisor; and 3) the advices which given by Sayyid Uthman more religious, fits his position as an ulama and mufti.

Keywords : *Mufti, Penasehat Pemerintah, Kontroversial.*

Tulisan ini akan diusahakan untuk memahami bagaimana hubungan yang terjadi antara Sayyid Utsman bin Yahya, sebagai seorang tokoh Islam di Indonesia pada abad 19 dan awal abad 20 dengan Snouck Hurgronje, seorang pejabat pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ada dua alasan yang perlu dikemukakan tentang tulisan ini; pertama, karena Sayyid Utsman adalah ulama Islam Indonesia (mufti Betawi) yang sering dikecam karena keterlibatannya dengan pihak kolonial, maka penelusuran ke arah ini sangat perlu dilakukan; dan kedua, karena Snouck Hurgronje adalah pejabat kolonial Hindia Belanda yang sangat kontroversial, terutama karena pandangan politiknya saat itu, maka penelusuran ke arah ini, dalam hubungannya dengan Sayyid Utsman, juga perlu dilakukan.

Pemahaman ini setidaknya akan membuka pengetahuan kita tentang siapa Sayyid Utsman dan mengapa ia dekat dengan Snouck Hurgronje. Idealnya, pemahaman objektif terhadap masalah ini akan membuka pengetahuan kita tentang sejarah sosial intelektual Islam di Indonesia abad 19 dan awal abad ke 20.

Pendahuluan

Sayyid Utsman adalah ulama yang sangat kontroversial dalam sejarah Islam di Indonesia khususnya pada abad 19. Ia dipuji sekaligus dikecam; dipuji karena konsekuensinya dalam mengancam tradisi bid'ah dan khurafat, tetapi dikecam karena keterlibatannya dengan pemerintah kolonial.

Azyumardi mengatakan bahwa Sayyid Utsman adalah ulama Hadrami yang paling terkemuka di Nusantara pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Keterkemukaannya terletak tidak hanya pada karir keulamaannya yang luar biasa, tetapi juga pada posisi pentingnya dalam administrasi kolonial Belanda di Hindia Belanda. Steenbrink juga mengatakan bahwa Sayyid Utsman adalah seorang tokoh gerakan pembaruan Islam yang terkemuka di Indonesia pada abad ke 19. “Pembaruannya” terletak pada serangannya yang tiada henti terhadap hal yang dianggapnya bid’ah dan tarekat yang tidak sesuai dengan syariat.

Kontroversi terhadap Sayyid Utsman semakin jelas dengan gelar dan medali penghormatan yang didapatnya dari pemerintah kolonial. Ia dianggap sebagai kaki tangan; karya-karyanya dibeli dan disebar untuk mendukung *status-quo* pemerintahan. Namun pada saat yang sama, Sayyid Utsman juga dikenal sebagai mufti dan menjadi sumber informasi bagi sejumlah besar ulama dan penghulu di Nusantara. Ia dikabarkan menjalin persahabatan dengan sejumlah besar ulama lokal dan dunia; termasuk juga dengan Snouck Hurgronje dan Hole. Posisinya sebagai penulis dan pemilik percetakan litografis, juga memungkinkan karya-karyanya tersebar secara luas; walaupun ada karyanya yang dibeli pemerintah dan disebar untuk kepentingan politik.

Latar Belakang Intelektual Sayyid Utsman

Nama lengkap tokoh ini adalah Utsman ibn ‘Abdullah ibn ‘Aqil ibn ‘Umar ibn ‘Aqil ibn Syekh ibn ‘Abd al-Rahman ibn ‘Aqil ibn Ahmad ibn Yahya—dari sini marga Sayyid Utsman diambil—ibn Hasan ibn ‘Ali ibn ‘Alwi ibn Muhammad Mawla al-Dawilah ibn ‘Ali ibn ‘Alwi ibn Muhammad Faqih Muqaddam ibn Ali ibn Muhammad Shahib Mirbath ibn ‘Ali Khala’ Qasam ibn ‘Alwi ibn Muhammad ibn ‘Alwi ibn ‘Ubaidillah ibn Ahmad al-Muhajir ibn Isa ibn Muhammad al-Naqib ibn ‘Ali al-‘Uraidhi ibn Ja’far Shadiq ibn Muhammad al-Baqir ibn ‘Ali Zain al-‘Abidin ibn Husein ibn ‘Ali ibn Abi Thalib dengan Fathimah binti Muhammad SAW.³⁸⁰

Sayyid Utsman dilahirkan di Pekojan, Betawi, pada tanggal 17 Rabiul Awal 1238 (1822 M). Ayahnya, Abdullah, dan kakeknya ‘Aqil, dilahirkan di Makkah, tetapi

³⁸⁰ Sayyid Utsman, *Ḥadziḥ al-Syajarah al-ʿĀliyah fī al-Rawḍah al-Saniyyah* (manuskrip); lihat juga Sayyid Utsman, *ʿAqd al-Jumân fī Adâb Tilâwat al-Qurʿân*, (Batavia, Percetakan Sayyid Utsman, tt) h. 116.

Setelah tujuh tahun di Makkah, Sayyid Utsman melanjutkan kembali perjalanannya ke Hadramaut pada tahun 1264 (1848) dan mengambil pengetahuan kepada para ulama Hadramaut; Sayyid Abdullah bin Husein bin Thahir, Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya, Sayyid Hasan bin Shalih al-Bahr, Sayyid Muhammad bin Husein bin Thahir dan Sayyid ‘Alwi bin Saqqaf al-Jufri.³⁸⁷ Selain itu disebutkan juga Sayyid Muhsin bin Alwi al-Saqaf, Sayyid Alwi bin Zein al-Habsyi, Sayyid Abdullah bin Husein bin Syihabuddin, Sayyid Ahmad Junaid.³⁸⁸ Ia menghabiskan waktu sekitar delapan tahun berada di Hadramaut; cukup waktu untuk mengenal seluk beluk propinsi tersebut yang di kemudian waktu ia gambarkan dalam sebuah peta besar propinsi Hadramaut.³⁸⁹

Selang beberapa waktu di Makkah, Sayyid Utsman melanjutkan kembali perjalanannya ke kota Madinah untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad. Di sini Sayyid Utsman belajar kepada Syekh Muhammad al-‘Azab dan Sayyid Umar bin Abdullah al-Jufri. Dari Madinah, perjalanan Sayyid Utsman diteruskan ke Mesir. Selama delapan bulan, Sayyid Utsman sempat belajar kepada para ulama Mesir. Selain itu, ketika berada di Tunisia ia juga berkenalan dengan para ulama di sana, diantaranya Syekh Muhammad bin Abdul Jawad dan Syekh Ahmad bin Manshur.³⁹⁰ Ia juga diinformasikan telah bertemu dengan mufti Pasya yang tinggal di distrik Qabis, kira-kira 5 mil perjalanan dari ibukota Tunisia. Mufti Pasya ini menjadi guru Sayyid Utsman selama 5 bulan keberadaannya di Qabis.

Setelah Tunisia, tujuan perjalanan Sayyid Utsman dalam rangka *ṭalabul-ʿilmi* ini diarahkan ke Aljazair. Tidak lama, ia selanjutnya bergerak ke Fes, salah satu kota besar di Maroko. Di kota ini juga Sayyid Utsman belajar kepada beberapa ulama terkemuka, baik dalam bidang syariah (eksoterik) atau hakikat (esoterik).³⁹¹ Lalu di Istanbul, ia juga diberitakan menjalin hubungan guru-murid dengan *ṣaikh al-Islâm* dan mengambil *tabarruk* selama tiga bulan keberadaannya di Istambul.³⁹² Dari Istambul, perjalanan Sayyid Utsman mencari ilmu dan menjalin hubungan belajar mengarah ke kota Syria dan (termasuk di dalamnya) Palestina. Niatnya adalah berziarah ke Bait al-Maqdis dan Masjid al-Aqsha. Tetapi setelah niat ini terlaksana, Sayyid Utsman juga sempat belajar kepada Syekh Abdul Qadir al-Jazairi. Nama terakhir ini adalah bekas raja dari Aljazair yang terusir akibat penjajahan Perancis. Perjalanan ini berakhir setelah ia kembali ke Hadramaut. Di tanah leluhurnya ini ia tinggal untuk beberapa tahun bersama keluarga dan anak-anaknya. Dari sinilah selanjutnya ia kembali ke Indonesia melalui Singapura pada tahun 1279/1862.

³⁸⁷ Abdullah bin Utsman, *Suluh Zaman*, h. 4.

³⁸⁸ *Dzikru Masyâikh al-Mu'allif*, h. 1.

³⁸⁹ Peta ini dapat dilihat di Perpustakaan Nasional dengan kode 1090; 1091 yang dibuat pada tahun 1309/1891-2; dan kode 1092.

³⁹⁰ *Dzikru Masyâikh al-Muallif*, h. 1.

³⁹¹ Abdullah bin Utsman, *Suluh Zaman*, h. 5.

³⁹² Abdullah bin Utsman, *Suluh Zaman*. h. 6.

Kedudukan Sayyid Utsman sebagai Ulama dan Mufti Batavia

Pencarian Sayyid Utsman terhadap ilmu dan pengetahuan di Timur Tengah berlangsung sampai ia berusia 40 tahun. Tepatnya pada tahun 1279/1862, Sayyid Utsman meninggalkan Hadramaut dan tiba di Hindia Belanda. Di Batavia, ia memberikan pelajaran keagamaan kepada masyarakat. *Suluh Zaman* dan *Taftih al-Muqlatayni* menceritakan bahwa banyak masyarakat pada saat itu yang berharap dapat menimba ilmu dari Sayyid Utsman. Pada awalnya Sayyid Utsman keberatan karena ia merasa ilmunya masih sedikit. Tapi karena saat itu tidak ada yang memberikan bimbingan kepada masyarakat, maka Sayyid Utsman akhirnya menerima kewajiban tersebut.³⁹⁹ Selain itu juga atas permintaan Syekh Abdul Ghani Bima, Sayyid Utsman mulai menggantikan posisinya yang sudah mulai lemah sebagai pengajar di masjid Pekojan. Bisa dimungkinkan, Syekh Abdul Ghani mengakui kemampuan yang dimiliki Sayyid Utsman.

Menurut Snouck, Sayyid Utsman mendapatkan penghormatan yang tinggi baik dari kalangan masyarakat Eropa, bangsa Arab dan terutama pribumi.⁴⁰⁰ Di kalangan bangsa Eropa, Sayyid Utsman dikenal karena pernah membuat peta negerinya, Hadramaut. K.F. Holle, yang bertugas sebelum Snouck, diinformasikan pernah bekerja sama dengan Sayyid Utsman; yang dengan ini kita dapat menandakan bahwa pergaulannya cukup luas tidak terbatas kepada orang Islam saja. Sementara itu, di kalangan masyarakat pribumi, Sayyid Utsman dianggap sebagai seorang ulama yang sangat tegas dalam menegakkan hukum Islam. Sikapnya yang anti terhadap segala macam bid'ah dan *khurafat* dalam kehidupan beragama, mengharuskan ia menyusun banyak buku demi menerangkannya kepada masyarakat.

Kedua jabatan ini dapat kita buktikan dalam kehidupannya sehari-hari. *Suluh Zaman* menceritakan beberapa kisah keulamaannya. Beberapa kejadian penting, menjadi sebab bagi Sayyid Utsman untuk menerangkannya dalam sebuah buku. Juga ketika ia menjumpai suatu masalah yang sangat khusus diantara sekian banyak

399 Dalam *Suluh Zaman* diceritakan, “maka sesudahnya ia kembali dari Surabaya, maka banyaklah orang yang datang kepadanya hendak menuntut ilmu daripadanya dengan berulang-ulang mereka itu. Setelah itu maka menerimalah ia datangnya mereka dengan berkata-kata bagi mereka itu. “Adapun aku ini sebetulnya bukan dari pada ulama besar dan tiada berapa banyak ilmuku, hanya sedikit saja yang aku peroleh daripada guru-guruku dan berkahnya mereka itu. Akan tetapi barang siapa yang berkehendak berkah itu guru-guruku maka aku sampaikan hajatnya sebagaimana dapat aku itu. Maka datanglah oleh kamu kapan-kapan saja kehendak kamu dengan masing-masing jangan sekali memikirkan suatu apa-apa, karena aku akan mengajar karena Allah ta’ala, tiada berkehendak akan upahan.” Abdullah bin Utsman, *Suluh Zaman*. h. 8. Dalam *Taftih al-Muqlatayni* juga disebutkan pernyataan Sayyid Utsman, “Tetapi ketika aku lihat di Jawa tidak banyak bahkan tidak ada orang yang memberikan fatwa atau bimbingan, maka dengan serta merta aku berlari mendatangi orang-orang pincang yang sedang berjalan ke arahku”. Lihat, Sayyid Utsman, *Taftih al-Muqlataini wa Tabyin al-Mufsidatayni*; juga, Hurgoronje, “Islam dan Fonografi” dalam, Hurgronje, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje IV* (Jakarta, INIS, 1996) h. 175.

⁴⁰⁰ Hurgoronje, "Islam dan Fonografi", h. 175.

melihat lebih dulu bagaimana kondisi masyarakat Arab pada saat itu. Deskripsi ini dimaksudkan untuk mendekati persoalan secara sistematis, mengingat kedudukan Sayyid Utsman sebagai penasihat pemerintah sering diperdebatkan. Karena itu pemahaman tentang kondisi masyarakat Arab saat itu sangat diperlukan terutama untuk memberikan perkiraan jawaban yang sesuai dengan persoalan pokok sub bab ini.

Laporan yang sangat bermanfaat tentang masyarakat Arab dan Hadramaut di Nusantara, kita dapati dari penelitian van den Berg dalam *Le Hadhramout Et. Les Colonies Arabes Dan's L'Archipel Indien*, yang terbit pada tahun 1886. Buku ini secara khusus menyajikan informasi penting tentang ragam kehidupan bangsa Arab di Nusantara, baik dari sisi sosial dan budaya, sampai politik dan agama.

Sensus yang diadakan pemerintah Belanda pada tahun 1885 menyebutkan bahwa jumlah orang Arab di Jawa dan Madura berkisar 10.888 jiwa; sedangkan di luar Jawa-Madura berkisar 9613 jiwa. Di Batavia sendiri (termasuk Meester Cornelis atau Jatinegara, Bogor dan Tangerang), terdapat sekitar 1662 orang Arab; padahal pada tahun 1859 jumlah mereka hanya mencapai 312 jiwa.⁴⁰⁶ Mereka kebanyakan tinggal di daerah Pekojan, Krukut dan Tanah Abang.⁴⁰⁷ Melihat banyaknya jumlah masyarakat Arab ini, maka keperluan untuk mengetahui bagaimana sikap, budaya dan pandangan keagamaan mereka, dalam hal ini dapat kita maklumi. Bahkan kita dapat mengatakan bahwa keperluan untuk mengangkat seorang penasehat pemerintah untuk urusan bangsa Arab juga menjadi suatu hal yang mutlak. Untuk melihat bagaimana keadaan orang Arab di Nusantara pada saat itu, deskripsi berikut akan lebih banyak diambil dari laporan Van den Berg.⁴⁰⁸

Seperti orang Cina, masyarakat Arab di Nusantara sangat meminati perdagangan. Pusat perdagangan mereka adalah kota Batavia, Semarang, Surabaya dan Singapura. Sebagian diantara mereka juga mendominasi perdagangan, misalnya di daerah Palembang dan Pekalongan. Seiring dengan imigrasi masyarakat Arab ke Nusantara, usaha pelayaran kapal laut tampaknya mendapat perhatian yang cukup besar dari masyarakat Arab. Setidaknya ada beberapa kapal laut milik orang Arab yang mempunyai rute Singapura-Jeddah untuk mengangkut para jamaah haji dari Nusantara.

Di bidang pertanian, ada juga masyarakat Arab yang memiliki tanah persawahan yang disewakan kepada para petani; di samping tentu saja ada sawah-sawah yang

⁴⁰⁶ Berg, *Hadramaut*, h. 68-70.

⁴⁰⁷ Penelitian Van den Berg juga melaporkan orang-orang Arab yang tinggal di Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Gresik, Surabaya, Aceh, Palembang bahkan Pontianak. Umumnya mereka disatukan antara orang Arab dan orang Arab Hadramaut. Yang terakhir ini menjadi istimewa karena kedudukan mereka di mata pribumi diakui sebagai keturunan dari Husein, cucu Nabi Muhammad.

⁴⁰⁸ Lihat lebih lengkap dalam karangan Van den Berg, khususnya pada bagian II tentang masyarakat Arab di Nusantara.

kepada pemerintah Belanda; dan secara keseluruhan mereka tidak memusuhi orang Eropa.

Tetapi sejak muncul ide Pan Islam serta didirikannya konsulat Turki di Batavia, sebagian masyarakat Arab mulai menyuarkan perbaikan kedudukan mereka yang sama dengan bangsa Eropa.⁴¹² Latar belakang masalah ini dapat kita lihat melalui keputusan pemerintah yang memberlakukan pemisahan antara orang Eropa, Timur Asing (Arab, Cina dan India) dan pribumi. Dua kelompok terakhir (Timur Asing dan pribumi) mendapat perlakuan yang kurang baik untuk melakukan perjalanan jika tidak memiliki izin dari pemerintah kolonial.⁴¹³

Dengan melihat data-data ini, kita dapat mengatakan bahwa keadaan masyarakat Arab pada masa Sayyid Utsman memang sangat beragam. Seluruh aspek dan sarana kehidupan mereka, mungkin harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Untuk mendapatkan informasi tentang masalah-masalah orang Arab dan masyarakat Hadramaut, pengangkatan Sayyid Utsman sebagai penasehat pemerintah sangat penting dilakukan.

Informasi Pengangkatan Sayyid Utsman

Memang, Sayyid Utsman diangkat sebagai penasihat pemerintah Belanda pada bulan April 1891. Tetapi dari Sayyid Utsman sendiri, kita tidak memperoleh informasi tentang pengangkatannya tersebut. Bahkan dari seluruh tulisannya, tidak tercantum prediket yang diembannya tersebut sejak 1891 sampai 1914; kecuali hanya sebagai mufti Betawi yang disebut oleh beberapa orang yang berkirir surat kepadanya. Sayyid Utsman sendiri lebih suka menyebut dirinya sebagai *al-'Abd al-Dzalil*.

Informasi pengangkatannya baru kita dapati dari surat-surat Snouck khususnya sejak keberadaannya di Hindia Belanda pada tahun 1889. Dalam pembicaraannya dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada bulan Juni 1889—kira-kira 40 hari sejak kedatangannya—Snouck sudah membicarakan posisi Sayyid Utsman sebagai orang yang akan membantunya dalam melakukan penelitiannya.⁴¹⁴

⁴¹² Snouck Hurgronje dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal tertanggal 28 Juli 1904, mengatakan bahwa sejak 20 tahun yang lalu—berkisar tahun 1884—agitasi orang Arab Hadramaut terhadap tuntutan Pan Islam di Nusantara sudah ada. Di antara mereka adalah orang-orang Arab yang cukup terpendang dari kalangan Sayyid, seperti Sayyid Ali bin Syahab, Sayyid Abdul Kadir al-Ildrus, Sayyid Sahl bin Sahl, Sayyid Abdullah bin Alwi al-Attas, Sayyid Muhammad bin Abdurahman Salabiyah dan lain-lain. Terutama sejak didirikan konsulat Turki di Betawi, mereka dan orang Arab Hadramaut lain menganggap konsul jenderal Turki sebagai wakil kekuasaan yang disegani, yang mampu membantu mereka dalam mencapai keinginannya. Lihat Snouck Hurgronje, *Nasehat-Nasehat IX*, h. 1690.

⁴¹³ Reid, Anthony, "Pan Islamisme Abad Ke Sembilan Belas", Jakarta, INIS, 1995, h. 73.

⁴¹⁴ Gobee dan C. Adriaanse, *Nasehat-Nasehat Snouck Hurgronje IX*, h. 1623.

Sebelum keberangkatannya ke Hindia Belanda, Snouck sendiri telah memuji Sayyid Utsman sebagai orang yang lebih baik dari pada bupati peminum anggur yang berpandangan bebas. Beberapa karya Sayyid Utsman—tentunya sebelum pengangkatannya sebagai penasehat—telah dibaca Snouck, dan kemudian dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal, ia menyebutnya sebagai bukti betapa karangan-karangan Sayyid Utsman sangat berharga bagi pemerintah.

Dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal tertanggal 5 Juli 1890, Snouck juga mengirimkan sebuah tulisan Sayyid Utsman yang berjudul *Manhaj al-Istiqâmah fi al-Dîn bi al-Salamah*. Dalam surat tersebut, Snouck menguraikan secara ringkas isi kandungan buku Sayyid Utsman. Ketika berbicara tentang seruan kepada ‘jihad’ atau perang suci, Snouck merasa perlu membicarakan pikiran Sayyid Utsman yang mengutuk peristiwa Cilegon sebagai gerakan keagamaan yang palsu. Snouck juga gembira mendengar bahwa buku Sayyid Utsman tersebut dapat membantu mengurangi jumlah penganut tarekat di Banten.⁴¹⁵ Ini menunjukkan bahwa karangan Sayyid Utsman memiliki pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat saat itu dan tentu saja berharga bagi pemerintah.

Usulan Snouck tentang pengangkatan Sayyid Utsman sebagai penasehat honorer dapat kita lihat dalam suratnya tertanggal 5 April 1891. Surat yang diajukan kepada direktur Pengajaran, Ibadah dan Kerajinan, yang di dalamnya terdapat usulan kepada pemerintah pusat ini, pada umumnya menyinggung manfaat karya-karya Sayyid Utsman bagi pemerintah. Snouck pada saat itu mengatakan :

“Mengingat banyak sekali hasil karyanya, maka pengakuan memberi salah satu tanda penghargaan dari pemerintah, menurut penglihatan saya, Sayyid Utsman justru berhak atas hal itu. Bentuk tanda penghargaan itu, yang memang pantas bagi kedudukan dan lingkup pekerjaannya, rupanya adalah suatu gelar kehormatan”.

Selanjutnya, pada akhir surat, juga disebutkan :

*“Barangkali saya perlu memberanikan diri untuk memberi pertimbangan kepada paduka Tuan, sudilah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mengangkat Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya ‘Alawi sebagai Penasehat Kehormatan untuk Urusan Bangsa Arab”.*⁴¹⁶

Jadi, kita dapat memahami bahwa pengangkatan Sayyid Utsman sebagai penasihat untuk urusan bangsa Arab adalah untuk membantu pemerintah dalam mengambil keputusan tentang persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat Arab

⁴¹⁵ Gobee dan C. Adriaanse, *Nasehat-Nasehat Snouck Hurgronje IX*, h. 1627.

⁴¹⁶ Gobeë dan C. Adriaanse, *Nasehat-Nasehat Snouck Hurgronje IX*, h. 1626.

itu sendiri.⁴¹⁷ Pengangkatan ini juga mungkin diperlukan untuk menghadapi isu Pan Islamisme yang saat itu mulai menghinggapi masyarakat Arab seiring dibukanya konsulat Turki di Batavia. Tetapi yang lebih penting, pengangkatan Sayyid Utsman adalah atas usulan Snouck kepada pemerintah untuk memberikan penghargaan kepadanya karena karangan-karangannya dirasakan sangat bermanfaat bagi pemerintah.

Dalam kedudukannya sebagai penasehat urusan Arab, demikian Aqib Suminto, Sayyid Utsman harus bisa berdiri di atas dua kepentingan; yakni kepentingan pemerintah kolonial dan kepentingan masyarakat Arab sendiri.⁴¹⁸ Kedudukan ini juga yang sering menjadi alasan dari orang-orang Arab pada saat itu untuk mendeskreditkan Sayyid Utsman. Beberapa artikel di sejumlah koran berbahasa Arab yang terbit di Turki, Beirut atau Mesir, selalu menyudutkan posisi Sayyid Utsman sebagai pengkhianat dan orang yang tidak memperdulikan nasib sesama orang Islam.⁴¹⁹

Lebih dari itu, Sayyid Utsman juga dianggap sebagai orang yang melakukan kerja sama dengan pemerintah Belanda. Ia dikabarkan menerima sejumlah uang setiap bulannya atas partisipasinya memberikan informasi tentang perkembangan Islam di Hindia Belanda. Bahkan ia juga menerima sejumlah uang sebagai sumbangan untuk menutupi biaya cetak dalam usaha penerbitannya yang dianggap cocok untuk memelihara *status quo* politik.⁴²⁰

Bentuk Kerja Sama dengan Snouck Hurgronje

Untuk memahami persoalan ini, kita harus melihat lebih jelas bagaimana keterlibatan Sayyid Utsman dengan Snouck atau pemerintah Hindia Belanda. Seperti disebutkan, sebelum kedatangannya di Hindia Belanda, Snouck sendiri telah memuji Sayyid Utsman sebagai “Seorang Arab Sekutu Pemerintah Hindia Belanda”. Dalam karangan (diterbitkan tahun 1886) yang mengulas masalah organisasi tarekat di Nusantara ini, Snouck memuji langkah-langkah penentangan Sayyid Utsman terhadap apa yang disebutnya sebagai tarekat atau syekh sufi palsu. Pujian Snouck ini didasari dari dua karangan Sayyid Utsman, *al-Nashîhah al-Anîqah li al-Mutalabbisînâ bi al-Tharîqah* dan *al-Watsîqah al-Wâfiyah fi Uluwwi Sya`ni al-Tharîqah al-Shûfiyah* (tahun

⁴¹⁷ Perlu disebut satu contoh perkara yang terjadi pada tahun 1893 tentang pembagian harta warisan milik orang Arab, ayah dari Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Syahab, yang diakui oleh lembaga Yatim Piatu sebagai wali atas adik-adiknya yang di bawah umur. Dalam masalah ini, Snouck, bersama Ch. W. Margadant dan Sayyid Utsman, diangkat oleh Mahkamah Tinggi Hindia Belanda sebagai orang yang berhak memberi keterangan kepada Mahkamah tersebut. Lihat perkara tersebut dalam Snouck Hurgronje, *Nasehat-Nasehat IX*, h. 1637-1641.

⁴¹⁸ Aqieb Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta, LP3ES, 1985, h. 161.

⁴¹⁹ Misalnya dalam koran *al-Muayyad* (edisi 12 Februari 1896); *al-Ma'ulumat* (edisi no. 146, 150, 151 tahun 1899); *Liwa'* (edisi 11 Mei 1904); *Tsamarat al-Funun* (edisi no. 1255, tahun 1899). Lihat selanjutnya Snouck Hurgronje, *Nasehat-Nasehat IX*, h. 1648, 1694, 1744, 1748, 1750.

420 Steenbrink, Karel, *Beberapa Aspek Islam di Indonesia Abad 19*, Bandung, Bulan Bintang, 1984, h. 136; juga Azra, *Hadhrami Scholars*, h. 15.

karya Sayyid Utsman ini sebagai karya yang sangat bermanfaat dan telah berhasil mengisi kekosongan yang dihadapi peradiban agama saat itu.

Informasi lain yang diberikan Sayyid Utsman kepada Snouck adalah ketika terjadi perselisihan dua masjid di Palembang. Dari perselisihan ini, Snouck kemudian melihat bahwa pokok persoalan yang perlu diperhatikan pemerintah sebenarnya adalah pengangkatan hakim agama atau penghulu. Ia kemudian mengusulkan kepada pemerintah daerah di Palembang untuk melakukan kualifikasi kepada calon hakim agama atau penghulu.⁴²³ Usulan seperti ini juga disampaikan Snouck kepada pemerintah daerah di Banjarmasin untuk memberikan peringatan keras kepada hakim agama yang keras kepala karena tidak mau menerima pendapat yang lebih baik dari Sayyid Utsman dan masyarakat Islam di daerahnya.⁴²⁴

Dengan melihat data ini, kita dapat memperkirakan bahwa Sayyid Utsman memberikan informasi kepada Snouck tentang keadaan umat Islam saat itu dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama. Bagi Sayyid Utsman, memberikan pengajaran yang baik serta melindungi keyakinan umat Islam dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam agama merupakan kewajiban yang harus ia lakukan.⁴²⁵ Sikap tegas ini sendiri terus ia lakukan meskipun Snouck meninggalkan Hindia Belanda pada tahun 1906.

Adalah kenyataan yang perlu diperhatikan, bahwa hubungan antara Sayyid Utsman dengan Snouck Hurgronje terjalin dengan sangat erat. Bahkan Sayyid Utsman—dan mungkin juga Haji Hasan Mustafa—melihat Snouck sebagai seorang muslim.⁴²⁶ Dalam surat Sayyid Utsman kepada Snouck pada tanggal 1 Februari 1906—setelah ia meninggalkan Hindia Belanda—Sayyid Utsman menyebutnya sebagai Profesor Abdul Ghaffar.⁴²⁷ Begitu juga ‘Alwi bin Utsman Yahya dalam suratnya kepada Snouck tanggal 5 Februari 1914 yang memberitahukan bahwa Sayyid Utsman sudah meninggal dunia, menyebut Snouck dengan sebutan *al-mukarram akhîna fillah ‘Abdul*

⁴²³ Terhadap masalah ini, lihat selanjutnya bab ke IV khususnya sub bab ke 4.

⁴²⁴ Gobee dan C. Adriaanse, *Nasehat-Nasehat*, jilid V, h. 899.

425 Patut dijadikan contoh adalah ketika seorang Arab datang ke Batavia. Di sini ia mengaku dapat meramal nasib, memperlihatkan jodoh dan memberikan jampi kepada masyarakat. Ia berpakaian layaknya seorang sufi dari Arab. Karena Sayyid Utsman mengetahui bahwa orang Arab ini bukanlah orang baik-baik, ia meminta kepada pemerintah untuk mengembalikannya ke Arab. Permintaan ini kemudian dikabulkan oleh pemerintah. Lihat Abdullah bin Utsman Yahya, *Suluh Zaman*, h. 9. Ini membuktikan bahwa kedudukan Sayyid Utsman sebagai penasehat bagi pemerintah saat itu cukup berpengaruh terutama untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

426 Mengenai prediket sebagai seorang muslim, Koningsveld pernah mengatakan bahwa “Snouck pada tahun 1884 baru diperkenankan masuk ke kota Makkah setelah ia secara resmi masuk Islam. Selanjutnya bahwa selama pemukimannya di negeri bekas “Hindia Belanda” pun, dari tahun 1889-1906, sejauh ia bergerak di kalangan orang Indonesia, ia hidup sebagai seorang muslim”. Lihat : P.Sj. Van Koningsveld, “Nasehat Snouck sebagai Sumber Sejarah Zaman Penjajahan” dalam E. Gobe dan C. Adriaanse, *Nasehat-Nasehat C. Snouck Hurgronje*, jilid I, hal. xiv.

⁴²⁷ P.S.J. Van Koningsveld, *Snouck Hurgronje Dan Islam Delapan Karangan Tentang Hidup dan Karya Seorang Orientalis Zaman Kolonial* (Jakarta, Girimukti Pasaka, tt) h. 155.

juga kepada kerajaan agar diberikan keuntungan duniawi. Tetapi menurut Kaptein, pembacaan doa tersebut bukanlah hal yang luar biasa. Beberapa pejabat pribumi dan kesultanan di Hindia Belanda pernah memberikan doa untuk kesejahteraan Ratu.⁴³³

Sikap Akomodatif Sayyid Usman; Contoh Kasus

Kecaman negatif terhadap Sayyid Utsman dapat dengan jelas kita kaitkan dari sikap akomodatifnya terhadap kebijakan kolonial. Di sini kita akan melihat beberapa kasus yang menurut saya cukup penting untuk dibahas.

a. Masalah Pakaian

Sikap akomodatif Sayyid Utsman mungkin perlu kita hubungkan dengan pandangannya dalam masalah pakaian. Sebagaimana diketahui, pada masa Sayyid Usman politik pemerintah Belanda membagi penduduk ke dalam tiga golongan; Eropa, Timur Asing (Arab, Cina dan India) serta pribumi.⁴³⁴ Pembagian ini dimaksudkan untuk mempermudah pemerintah dalam mengawasi dan mengatur penduduknya. Orang Arab lebih banyak tinggal di daerah Pekojan atau Krukut. Sedangkan orang Cina lebih banyak tinggal di daerah Glodok dan Tanah Abang. Masing-masing penduduk dikepalai oleh seseorang yang disebut dengan kapten.

Dalam segi pakaian, pemerintah mengharuskan setiap golongan memakai pakaian asal mereka. Orang Arab memakai gamis; dan orang Cina memakai kuncir. Sedangkan bagi pribumi, aturan berpakaian tidak diberatkan, walaupun ada orang pribumi yang berpakaian gamis atau serban setelah pulang dari ibadah haji.

Sayyid Usman melihat pakaian pada saat itu lebih sebagai identitas kebangsaan, baik karena yang memakainya adalah orang Arab, Melayu-Jawa atau Eropa. Bukunya (terbit tahun 1904) berjudul *Ini Buku kecil Buat Menyatakan Pertegahan Hukum Adat Negeri Yang Bersamaan Pada Pertegahan Hukum Agama Islam Atas Orang Yang Menukarkan Pakaian Bangsaanya Dengan Memakai Pakaian Lain Bangsaanya* menyebutkan bahwa pakaian bangsa Eropa adalah jas dan topi; pakaian orang Arab adalah jubah atau gamis, serban atau kopiah; dan pakaian

⁴³³ Kaptein mencontohkan bahwa ketika Ratu berulang tahun pada tanggal 31 Agustus, Gubernur Jenderal van der Wijck mengadakan perayaan di kediamannya. Hadir di dalamnya para pejabat pribumi dari seluruh Nusantara termasuk Susuhunan Solo, Sultan Yogyakarta, Sultan Deli, Sultan Potianak dan Sultan Langkat. Semuanya memanjatkan doa untuk kesejahteraan Ratu dan Kerajaan. Lihat Nico Kaptein, *The Sayyid and The Queen: Sayyid Uthman on Queen Wilhelmina's Inauguration on The Throne of The Netherlands in 1898*. (Jurnal of Islamic Studies, 1998) h.170.

⁴³⁴ Dalam peraturan ini, orang Timur Asing tidak boleh pergi tanpa izin dari pemerintah. Mereka harus tinggal pada wilayah-wilayah tertentu di bawah seorang kepala kampung. Selain itu mereka juga harus mematuhi aturan dalam cara berpakaian. Untuk orang pribumi peraturan ini dihapuskan pada tahun 1860, tetapi untuk orang Timur Asing peraturan ini baru dihapuskan pada tahun 1915 / 1918. Lihat : Anthony Reid, "Pan Islamisme Abad ke Sembilan Belas", h. 72.

orang Melayu-Jawa adalah baju kebaya dan stangen.⁴³⁵ Orang Arab yang memakai jas atau topi, kebaya atau stangen maka ia dianggap telah menukar pakaian bangsanya sendiri. Begitu juga dengan orang Melayu dan Jawa.

Di dalam buku ini juga Sayyid Usman menyebutkan bahwa berpakaian dengan pakaian bangsa sendiri adalah bersifat wajib menurut hukum agama Islam dan bersifat mesti menurut adat negeri. Selain itu juga menukar pakaian bangsa sendiri sangat ditentang dalam Islam dan adat negeri. Jika orang ini menjadi saksi dalam suatu persidangan maka kesaksiannya tidak diterima.⁴³⁶ Jadi kita dapat mengatakan bahwa Sayyid Usman sangat menentang orang Arab atau Indonesia yang menukar identitas pakaiannya dengan pakaian Barat.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, kita perlu mengajukan pertanyaan, apakah penentangan Sayyid Usman tersebut disebabkan karena kebijakan pemerintah (politik) ataupun hanya bersifat fiqh? Pertanyaan ini perlu kita ajukan terutama untuk mendapatkan kesesuaian antara jawaban Sayyid Usman dengan kebijakan Belanda saat itu. Dalam tulisan Sayyid Usman, kita mendapatkan sedikit petunjuk bahwa keberatan Sayyid Usman lebih terletak pada masalah norma sosial saja; jadi bukan pada masalah politik. Menurutnya ada beberapa sebab mengapa pada saat itu sebagian masyarakat baik orang Arab atau pribumi memakai pakaian bangsa Eropa, yaitu; *pertama*, dengan memakai pakaian asing ia menyangka dapat kehormatan, disukai orang-orang besar; padahal kehormatan dari orang-orang besar didapat dengan tingkah laku yang baik, berperangai baik apalagi dengan memakai pakaian sendiri. *Kedua*, merasa hebat seperti orang-orang Eropa, ditakuti orang-orang kecil; padahal ia menjadi bahan tertawaan masyarakat. *Ketiga*, dapat gratis kalau naik kereta api. *Keempat*, Orang yang memakai baju besar atau sorban, kalau mau pergi ke tempat yang tidak baik (main judi, minum arak atau main perempuan) ia merasa malu.⁴³⁷

Diantara sebab-sebab yang dikemukakan Sayyid Usman di atas tidak ada yang berkaitan dengan masalah fiqh; kecuali sebab keempat yang sebenarnya lebih bersifat norma sosial saja. Memang, sampai pada masa itu identifikasi antara orang Islam dan orang Kristen (Eropa) lebih bersifat politik. Bahwa orang Kristen adalah orang kafir, berimbas kepada ciri pakaian dan bahkan sekolah mereka. Orang yang berpakaian seperti orang Kristen, atau menyekolahkan anak mereka ke sekolah Kristen dapat dianggap kafir atau bahkan menyalahi peraturan agama.

⁴³⁵ Sayyid Usman, *Buku Kecil Buat Menyatakan Pertegahan Hukum Adat Negeri Yang Bersamaan pada Pertegahan Agama Islam atas Orang yang Menukarkan Pakaian Bangsaanya dengan Memakai Pakaian Lain Bangsaanya*, (Batavia, Percetakan Sayyid Usman, 1904) h. 6.

⁴³⁶ Sayyid Usman, *Buku Kecil Buat Menyatakan Pertegahan Hukum Adat Negeri*, h. 6.

⁴³⁷ Sayyid Usman, *Buku Kecil Buat Menyatakan Pertegahan Hukum Adat Negeri*, h. 4-6.

Fatwa seperti ini pernah dijelaskan Deliar Noor dengan mengatakan bahwa “orang Indonesia yang memakai pakaian ala Eropa dianggap meniru-niru orang Eropa atau Belanda, yaitu orang-orang Kristen, dan kadangkala dianggap pula telah menjadi kafir. Lebih-lebih memakai dasi, celana pantolan dan topi ala Eropa, sangatlah dibenci oleh kiayi atau guru mengaji umumnya yang menghukum pemakaian dasi, celana pantolan dan topi tadi sebagai haram”.⁴³⁸

b. Masalah Jihad dan Tarekat

Dalam dua kasus ini, sikap akomodatif Sayyid Utsman sangat mungkin terlihat ketika ia mengecam pemberontakan yang dilakukan para petani di Cilegon pada tahun 1888. Analisis yang diberikan Azyumardi terhadap pandangan Sayyid Usman sangat menarik untuk diuraikan. Azra berangkat dari kenyataan bahwa Sayyid Usman bersikap akomodatif terhadap pemerintah Belanda dengan alasan bahwa, *pertama*, Sayyid Usman menerima kolonisasi tanah muslim oleh non-muslim, dan *kedua*, Sayyid Usman memiliki *konsern* untuk mencegah gangguan politik dan memelihara hukum dan aturan. Khusus untuk alasan pertama, Azra mengkaitkannya dengan pernyataan Sayyid Usman bahwa seorang hakim (*qadhi*) harus diangkat oleh penguasa, dan dianggap benar seandainya seorang *qadhi* juga diangkat oleh penguasa non muslim. Dengan dua alasan ini, Azra selanjutnya mengatakan bahwa adalah tidak mengherankan bahwa Sayyid Usman tidak menyetujui pemberontakan atau perang (*jihad*) melawan Belanda.⁴³⁹

Sikap kooperatif Sayyid Usman tampak dalam kecamannya terhadap pemberontakan Cilegon yang dianggapnya sebagai suatu *ghurur*.⁴⁴⁰ Dalam *Manhaj al-Istiqamah*, ia mengatakan bahwa kerusakan di Cilegon adalah batil, bukan jihad; karena tidak ada syarat-syaratnya. Perbuatan tersebut juga melanggar agama karena menjatuhkan banyak *dharurat* kepada masyarakat.⁴⁴¹ Tetapi Sayyid Usman sendiri tidak menjelaskan hal-hal apa saja yang menjadi syarat dan rukun dalam jihad. Ia hanya mengatakan bahwa syarat-syarat jihad itu adalah berasal dari kaum muslim sendiri dan berasal dari kaum kafir. ”*Tetapi baik di pihak sini atau di pihak sana,*

⁴³⁸ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta, LP3ES, 1996) h. 9.

⁴³⁹ Azra, *Hadhrami Scholars*, h. 16. Sikap pembelaan atas sikap akomodasionis Sayyid Usman pernah ditujukan kepada Azyumardi Azra dalam *Menangkal Fitnah Berbisa*. Dalam risalah kecil itu dikatakan bahwa; "jika seorang mufti yang bertugas mengurus kemaslahatan masyarakat Arab pendatang dan kemaslahatan Islam serta kaum muslimin pada zaman kekuasaan Belanda dituduh 'akomodasionis', lantas tuduhan apa lagi yang pantas dilontarkan kepada semua orang pribumi yang menempati kedudukan di dalam volkstraad—seperti Muhammad Husni Thamrin dan kawan-kawan yang menempati kedudukan dalam jajaran Binnenlands Bestuur dan semua orang yang bekerja sebagai pegawai negeri dalam administrasi Belanda?". Lihat, HMH. Al-Hamid al-Husaini, *Menangkal Fitnah Berbisa* (tk. [c]. tt), h. 19-20.

⁴⁴⁰ Lihat konsep *ghurur* dan hubungannya dengan bid'ah dalam pandangan Sayyid Usman pada bab III bagian C.

⁴⁴¹ Sayyid Usman, *Manhaj al-Istiqamah*, h. 22; Azra, *Hadhrami Scholars*, h. 17.

menunjukkan sikap fanatik; mereka juga tidak menaruh kebencian kepada orang Eropa karena perbedaan agama; mereka sangat menghargai bahwa di daerah jajahan Belanda, pranata hukum Islam di pelihara sebaik-baiknya.⁴⁴⁷

Sikap seperti ini juga dimiliki oleh Sayyid Usman, terutama karena dia adalah seorang ulama yang lebih berorientasi syariat. Sayyid Usman, demikian Berg, tidak henti-hentinya menunjukkan bahwa orang mungkin tetap setia kepada pemerintah Eropa di Nusantara sambil menjalankan ibadah agama Islam.⁴⁴⁸ Harapan untuk melaksanakan ibadah dengan damai bagi anak-anak negeri, tampak dari pernyataan Sayyid Usman terhadap pemerintah yang telah mengangkat dan memberikan gaji kepada para hakim agama.⁴⁴⁹ Kita dapat memahami pandangan ini karena—seperti diakui Azyumardi—Sayyid Usman lebih memahami syariat dengan pandangan yang sempit; syari'at menurutnya hanya memperhatikan masalah ritual. Sayyid Usman, tegas Azra, menolak implus-implus politik apapun terhadap syariat.⁴⁵⁰ Jadi, Sayyid Usman melihat bahwa pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dalam masyarakat harus dipertahankan dari segala gangguan, termasuk politik.

Secara historis, peristiwa Cilegon pada saat itu memiliki hubungan aktif dengan kebangkitan agama di kalangan masyarakat muslim. Sartono Kartodirdjo menguraikan lima faktor yang menjadi penyebab kebangkitan agama tersebut, yaitu; *pertama*, jumlah haji yang terus meningkat; *kedua*, jumlah pesantren yang meningkat; *ketiga*, adanya peningkatan jumlah masjid yang baru; *keempat*, adanya usaha penyebaran surat wasiat; dan *kelima*, adanya perkembangan tarekat, khususnya Naqsabandiyah.⁴⁵¹ Tetapi menurut Steenbrink, di daerah Cilegon tidak ditemukan 'Surat Wasiat'; dan yang berkembang di Cilegon bukan tarekat

⁴⁴⁷ Berg, *Hadramaut*, h. 114.

448 Berg, Hadramaut, h. 106.

449 Sayyid Usman, *Mishbah al-Zulam* (Batavia, Percetakan Sayyid Usman, 1903) h. 7. Dalam hal ini Sayyid Usman mengatakan, "bahwasanya keadilan punya karunia kepada anak-anak negeri akan mendirikan kepala agama Islam dengan bayar gaji kepadanya. Maka adalah itu karena menjaga kesenangan anak-anak negeri di dalam melakukan perihal agama, seperti sembahyang dan puasa dan nikah dan talak dan waris dan sebagainya yang biasa dikerjakan dengan menurut hukum al-Quran yang teratur di dalam kitab-kitab yang muktamad, yaitu yang mashur pada ulama yaitulah yang terpakai dari zaman dahulu dengan selamat selama-lamanya". Pada halaman 9 juga disebutkan, "tidak ada tempat buat masyarakat untuk berharap mendapat pertolongan kecuali kepada paduka pengadilan untuk mengangkat kepala agama dari orang Islam yang sempurna."

⁴⁵⁰ Azra, *Hadhrami Scholars*, h. 18.

⁴⁵¹ Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888* (Pustaka Jaya, Jakarta, 1984, cet. 1) hal. 219. Hamka juga menilai bahwa diantara sebab pemberontakan Banten adalah karena seorang haji (haji Wasid) didenda oleh pemerintah Belanda karena telah menebang pohon "keramat" milik seseorang yang dianggapnya telah membuat masyarakat menjadi syirik dengan mendatanginya. Mengutip ucapan dari pangeran Ahmad Jayadiningrat, bekas Regen Serang, menurut Hamka, sebab pemberontakan adalah karena pemerintah Belanda melarang pembacaan shalawatan, *tarhim* dan azan dengan suara keras. Di samping itu menara musholla yang dianggap sudah tua dirubuhkan. Hamka, *Dari Perbendaharaan Lama*, h. 112 dan 114. Bandingkan dengan Steenbrink, *Beberapa Aspek*, h. 59.

Tapi Sayyid Usman juga sangat menaruh harapan kepada pemerintah Belanda untuk tetap tidak mencampuri urusan dalam agama Islam, terutama tidak mencegah orang Islam untuk melakukan ajaran agamanya. Ia berterima kasih kepada pemerintah karena mau memberikan gaji kepada para hakim agama, membantu para penghulu dan guru-guru, memberikan libur kepada pengadilan agama di bulan puasa serta membantu mendirikan masjid. Karena itulah ia menganjurkan kepada masyarakat untuk berterima kasih kepada pemerintah dengan cara melakukan kebaikan agama dan tidak melanggar larangannya.⁴⁵⁷ Partisipasi seperti ini tampak dengan jelas ketika Sayyid Usman

457 Pernyataan Sayyid Usman tersebut dikutipkan disini, "maka di sini disebut segala kebajikan yang terdapat dari keadilan Gubernemen Belanda, kepada yang berteduh di bawah kerajaan, beserta disebut kelakuan yang wajib atas orang Islam akan membalas baik kepada kebajikan (Di sini terdapat teks yang berbunyi, *man ashda ilaikum ma'rufan fakaffi'uhu*; siapa yang memberikan kepada kalian perbuatan baik, maka cukupkanlah). Adapun kebaikan keadilan itu yang wajib mesti kita ingat baik-baik padanya, maka adalah itu terlalu banyak. Maka yang nomor satu dan yang amat besar dari pada itu yaitulah kontrak keadilan dengan tiada campur perkara agama dengan mufakat antara sekalian raja-raja. Artinya tiada menegah akan orang-orang Islam punya melakukan agama; dan kewajiban pula memberikan kesenangan kepada bangsa Islam punya melakukan agama dengan membayar gaji pada

menyarankan kepada masyarakat untuk selalu berpakaian seperti yang diatur oleh pemerintah, tidak mencuri dan merampok, berperilaku baik sesuai ajaran agama dan sebagainya.⁴⁵⁸ Tetapi ternyata, menurut Steenbrink, setelah Sayyid Usman meninggal, pemerintah Belanda mulai mencampuri urusan agama, terutama karena dihilangkannya jabatan mufti setelah Sayyid Usman.⁴⁵⁹

Penutup

Kita dapat menarik satu pemahaman bahwa kerja sama Sayyid Utsman dengan Snouck Hurgronje khususnya, dan pemerintah kolonial Hindia Belanda, pada intinya adalah untuk membantunya dalam penelitiannya tentang Islam di Nusantara. Kerja sama ini kemudian bersifat lebih resmi sejak Sayyid Utsman diangkat sebagai Penasehat Kehormatan untuk Urusan Arab. Bahkan kerja sama ini berjalan lebih intens karena hubungan mereka sesama muslim. Dalam kerja sama ini, Sayyid Utsman memberikan informasi melalui karya-karyanya tentang keadaan masyarakat Islam. Sebagai ulama dan juga mufti, karya Sayyid Utsman tersebut lebih bersifat keagamaan atau syari'ah. Seluruh pandangannya didasari dengan dalil-dalil agama yang ketat—sesuai dengan prinsip yang dipegang teguh Sayyid Utsman sendiri—sehingga ia menerima banyak kecaman dan hasutan dari orang-orang yang tidak suka dengan pandangannya.

Sikap akomodatif Sayyid Usman terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda, terutama dalam masalah politik juga dilakukan dalam kapasitasnya sebagai mufti dan ulama yang berkewajiban menjaga keselamatan masyarakat dari *ghurur* (tipu daya). Karena itu, dalam banyak karyanya, Sayyid Usman selalu menganjurkan masyarakat untuk berlaku baik terhadap pemerintah; dan mengharapkan pemerintah tidak mencampuri urusan agama. []

penghulu-penghulu raad agama dan memberi libur (*ferei*) pada pegawai-pegawai masjid dan pada guru-guru mengajar ngaji, dan membantu bikin masjid dan memberhentikan *landraad* pada bulan puasa dan lain-lain kebajikan yang sekalianny itu dapat dari sayangnya dan kemurahannya anak-anak negeri dengan beratus tahun. Adapun yang wajib atas sekalian kita dengan perintah Agama yang tersebut di awal fasal ini, akan membalas baik kepada keadilan punya kebajikan yang tersebut itu dengan memberi syukur padanya dengan tiada sekali-kali akan berani melanggar larangan jua adanya. Adapun permohonan dan pengharapan sekalian bangsa Islam kepada keadilan, maka yaitulah akan menetapkan kontraknya tiada campur perkara agama juga adanya”. Sayyid Usman, *Sinar Istirlam*, h. 7-9.

458 Anjuran-anjuran ini sering kita dapati dalam berbagai tulisan Sayyid Usman. Penekanan terhadap pelaksanaan ajaran Islam di kalangan penduduk, merupakan salah satu cara untuk menjadi warga yang baik. Kita dapat melihat hubungan masalah in dalam karyanya, *Buku Kecil Buat Menyatakan Pertegahan Hukum Adat Negeri yang Bersamaan pada Pertegahan Hukum Agama Islam atas Orang Yang Menukar Pakaian Bangsanya dengan Memakai Pakaian Lain Bangsanya; Fasal Kewajiban Pada Mencari Kehidupan; Ishlah al-Hal bi Thalab al-Halal*.

⁴⁵⁹ Karel Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Merdeka* (Jakarta, LP3ES, cet. II, 1994) h. 138.